



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BERGERAK **UNTUK** REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK
KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL
MELALUI PEMANFAATAN LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL

bangga
melayani
bangsa



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Arahan Presiden & Wakil Presiden Tentang **Reformasi Birokrasi**



1.

Birokrasi yang
Berdampak

2.

Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**

3.

Birokrasi **Lincah
dan Cepat**

(Ditopang Pemerintah Digital Berbasis Data)

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI BIROKRASI 2024

REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN

RB PENANGGULANGAN KEMISKINAN



1. Penajaman tata kelola perencanaan strategis serta program kegiatan berbasis dampak pada K/L/D
2. Mendorong *joint outcomes* lintas Instansi Pemerintah
3. Reformulasi kebijakan/program pengentasan kemiskinan

RB PENINGKATAN INVESTASI



1. Penataan proses bisnis sektor perizinan lintas K/L/D
2. Reformulasi kebijakan/program peningkatan investasi

RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN



Penguatan tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden

RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

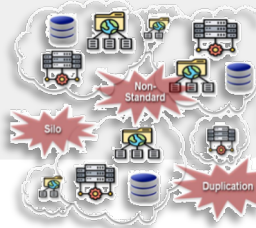


1. Keterpaduan Layanan Digital
2. Integrasi dan validasi Data
3. Distribusi Digital talent (Talenta Digital)

TANTANGAN, URGENSI ARSITEKTUR SPBE DAN HARAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL DI INDONESIA

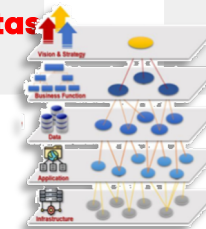
Tantangan Penerapan Digital Government

1. **Pembangunan TIK sektoral**
2. **Tata Kelola TIK dan data tidak terpadu**
3. **Tingkat Kematangan SPBE rendah**
4. **Belum optimal penerapan Keamanan Informasi**



Percepatan Penerapan SPBE

1. **Perlunya peningkatan kualitas layanan pemerintah, melalui pemanfaatan teknologi digital**
2. **Kebutuhan penguatan kolaborasi dan koordinasi**
3. **memperkuat Keamanan Informasi**
4. **Keperluan integrasi layanan pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas,**
5. **Menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis**
6. **Penerapan standardisasi TIK untuk peningkatan kualitas layanan digital Nasional**
7. **Peningkatan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**



Hasil yang Diharapkan

1. **Arsitektur SPBE Nasional sebagai panduan integrasi dan interoperabilitas antar proses bisnis dan dukungan TIK, serta penguatan keamanan informasi secara terpadu**
2. **Mempercepat terbentuknya Layanan Digital Nasional, bagian upaya modernisasi birokrasi berbasis digital**
3. **Mendukung efektivitas tata Kelola pemerintahan, meningkatkan Tingkat Kematangan SPBE**



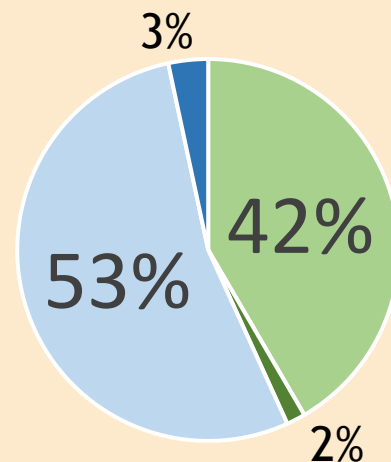


Pemberian rekomendasi belanja TIK pada Instansi Pusat, dilakukan sejak Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pemberian kewenangan dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN (Surat Bersama).

Pelaksanaan teknis dilaksanakan pada tingkat Eselon I (Rekomendasi diberikan dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana dan Dirjen APTIKA kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu)

Pelaksanaan untuk TA 2023 (hingga bulan Juni 2023)

1. Lingkup rekomendasi belanja TIK, bersumber dari Rupiah murni dan dari hibah (*grant*), hutang (*loan*) atau pendanaan lainnya yang masuk pada DIPA K/L
2. Total usulan belanja SPBE, sebesar 6,25 T dari 42 Instansi Pusat (masih terdapat 24 Instansi Pusat yang belum mengajukan)
3. 1295 dokumen belanja TIK dengan total 6,25 T, terdiri dari 2,7 T berupa belanja Aplikasi dan 3,55 T berupa belanja infrastruktur TIK
4. Sebesar 310 M, usulan belanja TIK tidak dilanjutkan, dikarenakan pembangunan aplikasi bersifat duplikasi dan penyediaan infrastruktur yang sudah disediakan dari KemenKominfo
5. Terdapat isu pemberian rekomendasi, bagi belanja TIK yang sudah menjadi komitmen pemerintah kepada pihak donor (*grant, loan*). Sehingga diperlukan pembahasan yang melibatkan negara donor, Kemenkeu, dan Bappenas, dan para pihak terkait

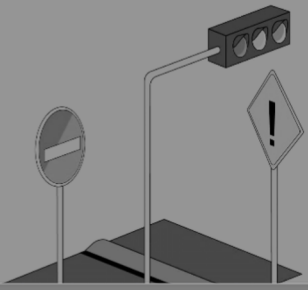


- Aplikasi dilanjutkan
- Aplikasi tidak dilanjutkan
- Infrastruktur dilanjutkan
- Infrastruktur tidak dilanjutkan

Persiapan pelaksanaan untuk TA 2024

1. Telah dikeluarkan Surat Bersama (Menteri Keuangan dan Menteri PPN), tanggal 10 April 2023
2. Surat Bersama untuk TA 2024, menambah konten rekomendasi belanja TIK untuk lingkup kegiatan pengelolaan Data
3. Telah dilakukan pembahasan teknis dengan Kemenkominfo dan KemenPPN/Bappenas untuk penyiapan Surat Bersama (Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri PPN) dalam teknis pelaksanaan rekomendasi belanja TIK pada Instansi Pusat

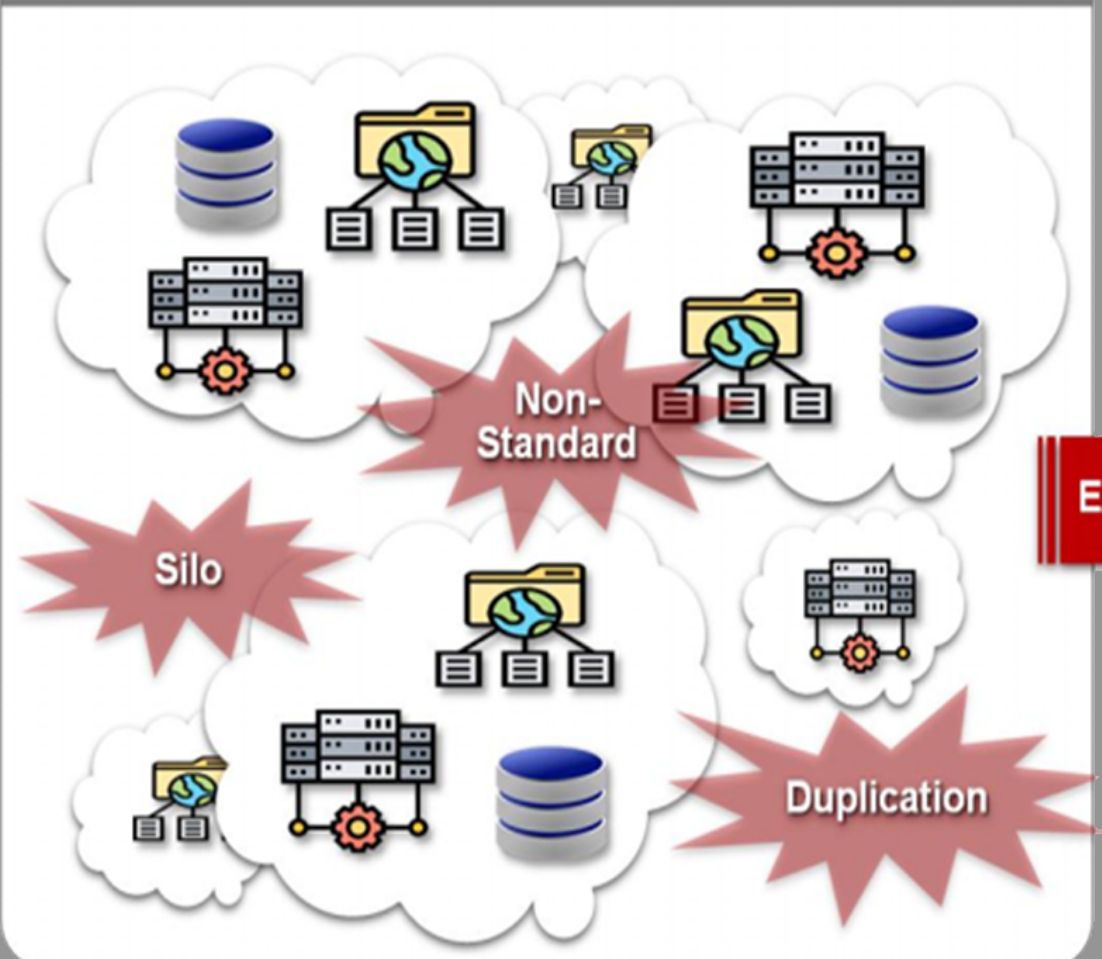
2. Pengamanan Program/Kegiatan Tertentu
 - a. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), dan Program Digitalisasi Nasional, maka kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga berupa:
 - 1) Pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum;
 - 2) Pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru (DC/DRC);
 - 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE berupa bangun/pengembangan sistem aplikasi khusus;
 - 4) Survei, pendataan, pemetaan dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya;
 - 5) Pengolahan, produksi dan pembelian data;
 harus mendapatkan rekomendasi (*clearance*) dari Kementerian yang membidangi pelaksanaan SPBE dan SDI. Pemberian rekomendasi (*clearance*) tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bersama Menteri-Menteri yang membidangi pelaksanaan SPBE dan SDI.



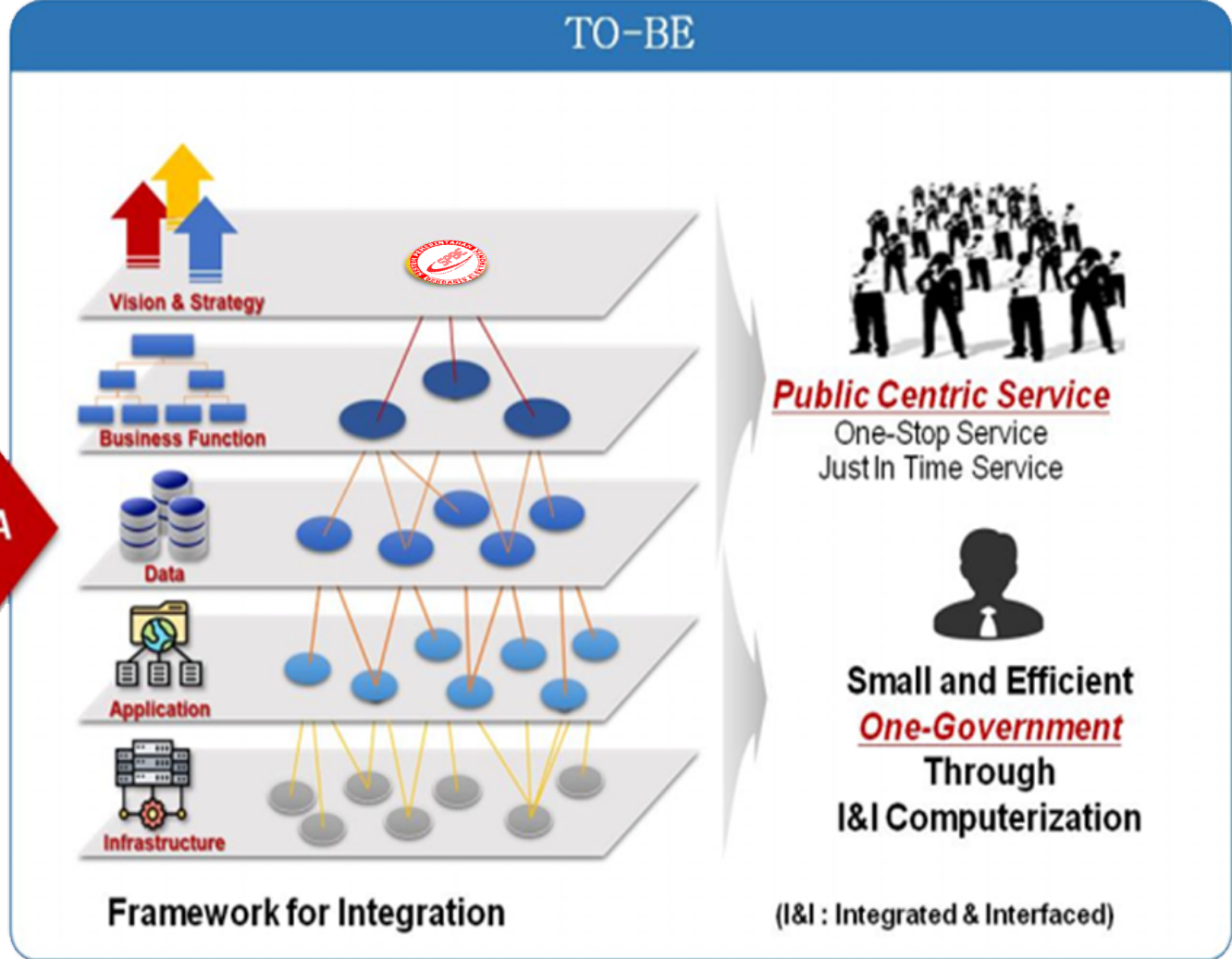
TANPA & DENGAN

ARSITEKTUR SPBE ●●●

AS-IS



TO-BE





SPBE sebagai Enabler Transformasi Digital Nasional

panrb

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



TUJUAN SPBE

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
- Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

DAMPAK SPBE

Terwujudnya hasil berbagai program prioritas pemerintah seperti:

- pengentasan kemiskinan
- pemberantasan korupsi
- peningkatan investasi
- penggunaan produk dalam negeri

KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018 meliputi seluruh unsur-unsur SPBE



Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Arsitektur . . .



Perpres Arsitektur SPBE Telah Ditandatangani **Bapak Presiden Joko Widodo**

Bukti komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE & keamanan SPBE untuk Pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik

ARSITEKTUR

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SESUAI AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE



DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

MANFAAT



Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan



Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat **Keamanan Informasi**



Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)**



Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**



Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru



Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**



JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun



TERDIRI DARI

- Arsitektur SPBE Nasional
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Visi dan Misi SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Arsitektur SPBE

Domain Layanan SPBE

Domain Aplikasi SPBE

Domain Proses Bisnis

Domain Data dan Informasi

Domain Infrastruktur SPBE

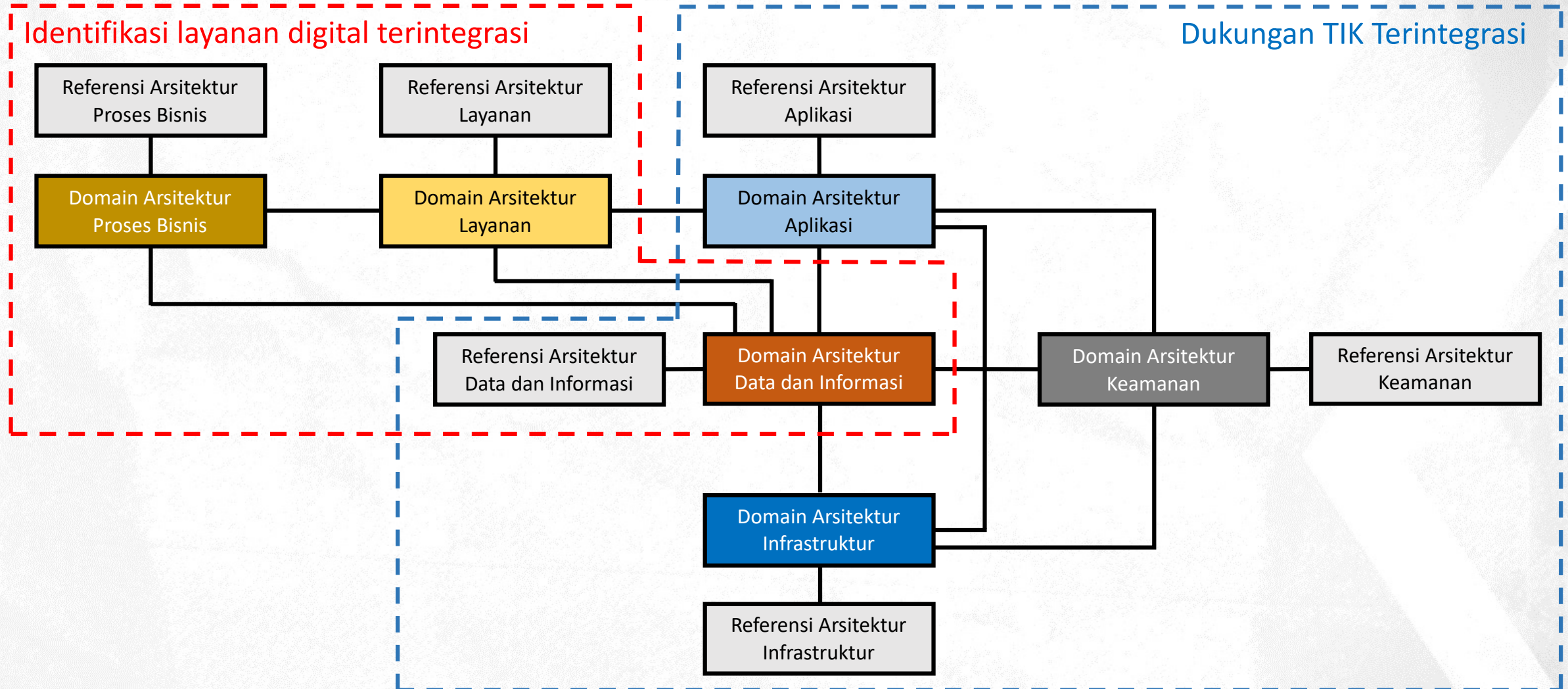
Domain Keamanan SPBE

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE

KERANGKA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR

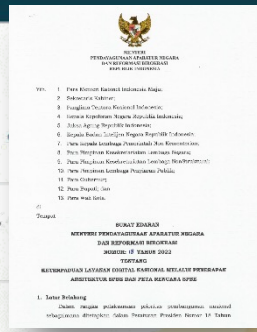




panrb

KEHENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN INFORMATIKA

SE Menteri PANRB nomor 18/2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE



MANAJEMEN & TATA KELOLA

DATA & INFORMASI
Data dan informasi digital yang digunakan oleh aplikasi dan layanan SPBE.

SATU DATA INDONESIA

APLIKASI
Perangkat lunak dan aplikasi yang mendukung bisnis proses terintegrasi dan layanan digital.

PROSES BISNIS
Proses bisnis pemerintah yang terintegrasi dan terdigitalisasi.

Proses bisnis lintas sektor

Digital Transformation - Mekanisme kerja Digital

INFRASTRUKTUR
Perangkat keras, jaringan, dan fasilitas seperti pusat data, yang menampung aplikasi SPBE dan menyimpan data dan informasi.

SaaS
PaaS
IaaS

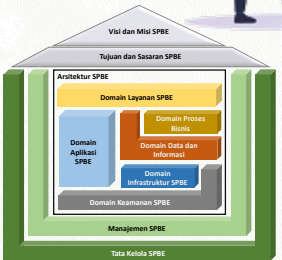
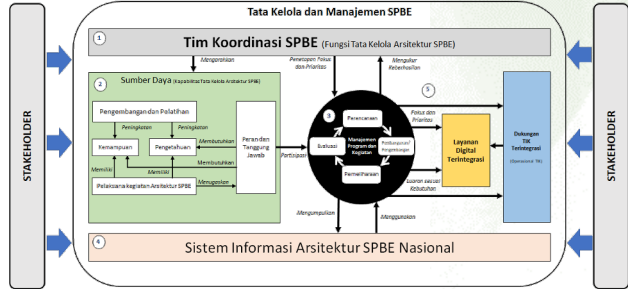
Secure as a Service

LAYANAN
Aplikasi layanan daring yang dapat digunakan dengan mudah oleh perorangan, lembaga pemerintah, dan bisnis.

Layanan Digital Nasional

KEAMANAN
Fasilitas, proses, dan kebijakan yang mendukung ketersediaan layanan SPBE dan perlindungan data dari akses tanpa izin.

Cryptography as a Services (CaaS)



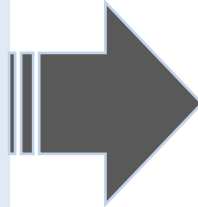
Legend

—	Relation
G2C	Government-to-customer services
G2B	Government-to-business services
G2G	Government-to-government services

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE APLIKASI SIPD



Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE ini sesuai bentuk **Peraturan Presiden**



Identifikasi Layanan Pemerintah



Dukungan Teknologi



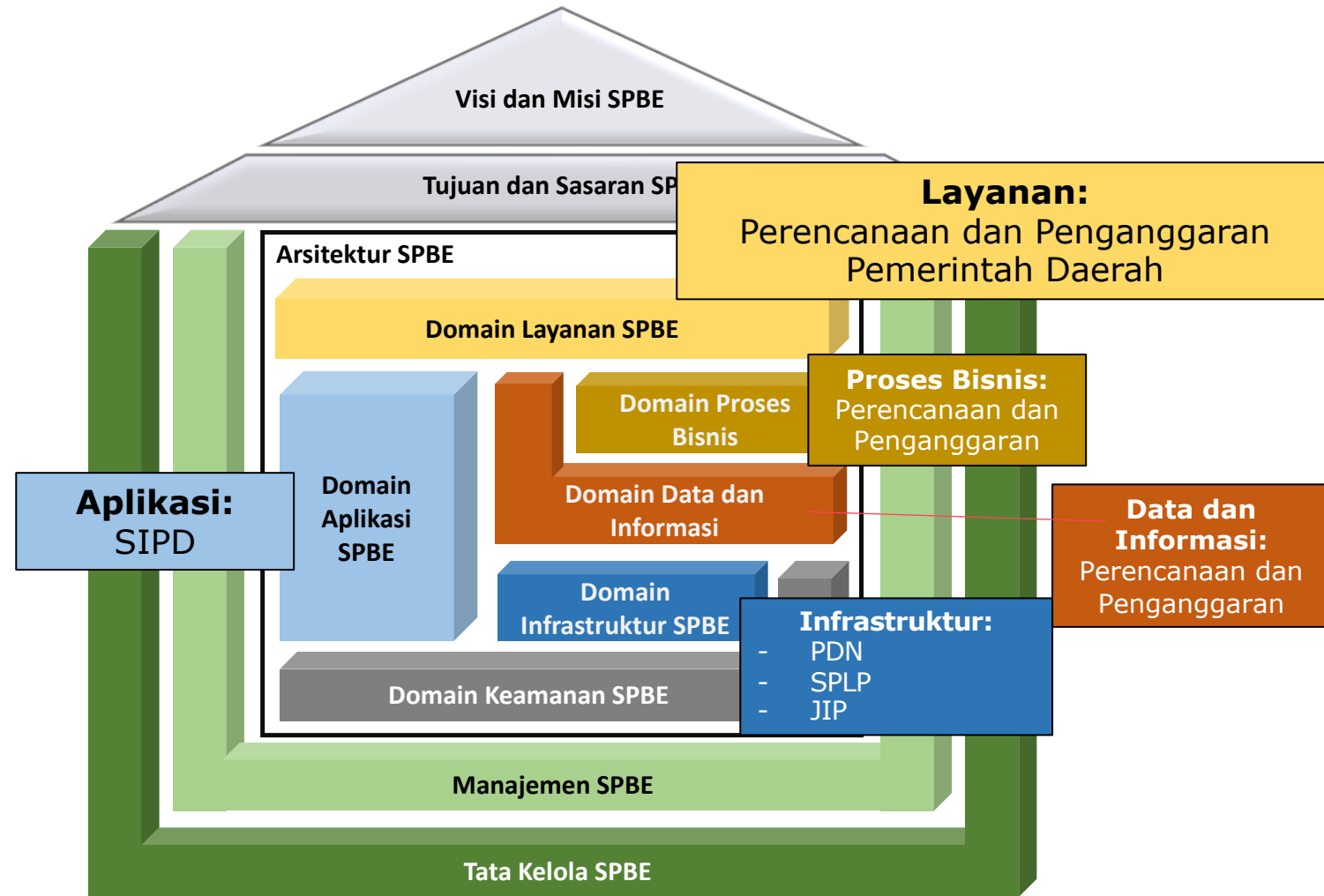
Dukungan Manajemen dan Tata Kelola



Kerangka Kerja SPBE

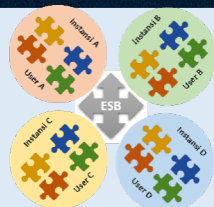


Arsitektur SPBE

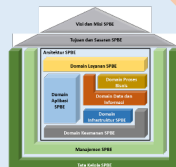


Kondisi Saat Ini

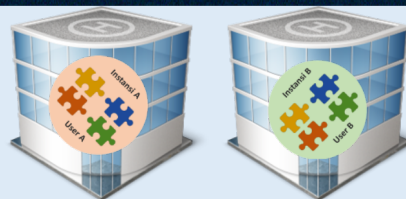
Sistem Informasi yang belum terintegrasi



**Strategi transformasi:
Keselarasan
Arsitektur
SPBE Nasional**



Digitalisasi pemerintahan yang bersifat silo atau sektoral



**Strategi transformasi:
Keterpaduan
dan Inklusivitas
Layanan**

Transformasi Layanan Pemerintah :

- 1. Digital Services**
- 2. Electronic Self Services**
- 3. Mobile Services**



**APLIKASI UMUM SPBE mendukung terwujudnya
LAYANAN DIGITAL NASIONAL**



Manfaat:

- Konsolidasi data
- Akuntabilitas pemerintahan
- Keterpaduan layanan digital pemerintah
- Efisiensi pengelolaan layanan TIK Nasional
- Berbagi pakai dan interoperabilitas

INFRASTRUKTUR SPBE



Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang **terhubung** dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan **digunakan secara bagi pakai** oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. terdiri atas:

- Pusat Data Nasional;
- Jaringan Intra pemerintah; dan
- Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah **masing-masing**. terdiri atas:

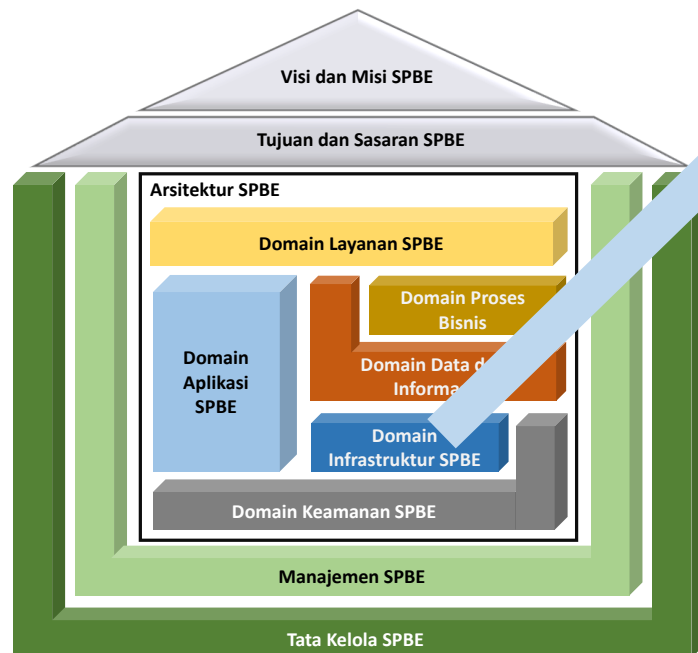
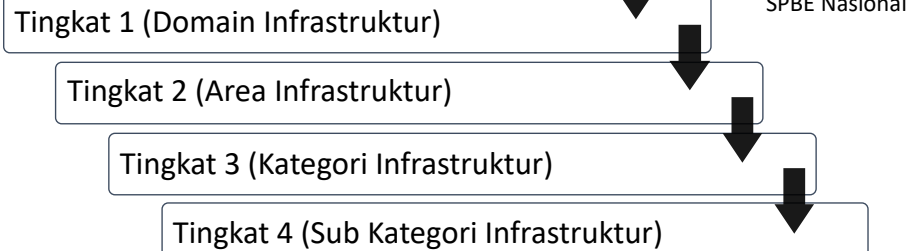
- Jaringan Intra IPPD; dan
- Sistem Penghubung Layanan IPPD.

REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE



Struktur Referensi

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE



Taksonomi Referensi

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Platform

Komputasi Awan

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

SPL Instansi Pusat

SPL Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

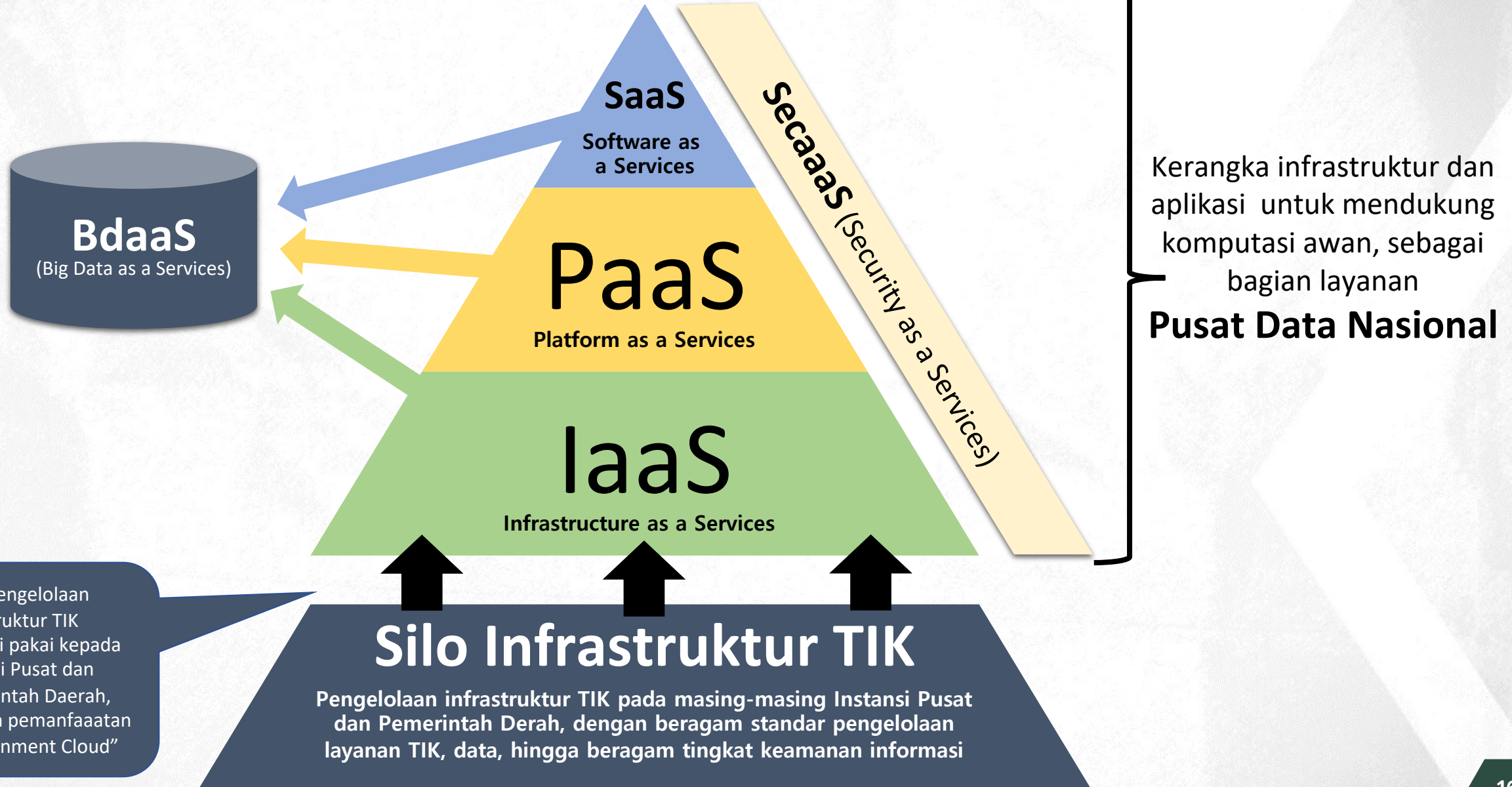
Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional

Pusat Komputasi

Pusat Kendali

INFRASTRUKTUR SPBE



METADATA ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

- KOMPUTASI AWAN
- PERANGKAT LUNAK PLATFORM
- PERANGKAT KERAS SERVER
- PERANGKAT KERAS MEDIA PENYIMPANAN
- PERANGKAT KERAS JARINGAN
- PERANGKAT KERAS KEAMANAN
- PERANGKAT KERAS PERIFERAL
- SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
- JARINGAN INTRA PEMERINTAH
- FASILITAS KOMPUTASI



panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN BERTUMBUH BANGSA

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK

PEMANFAATAN DIGITAL ID BERBASIS DATA

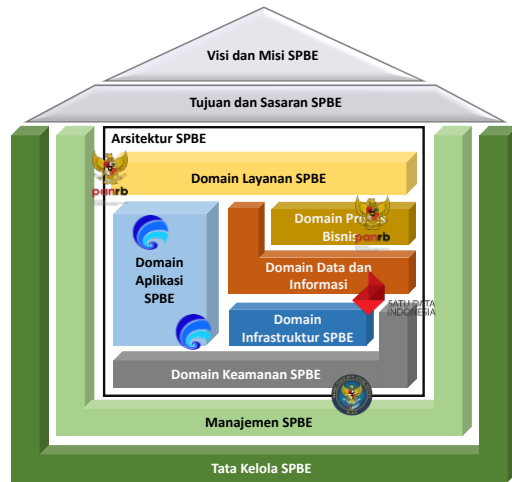
KEPENDUDUKAN

Arsitektur SPBE Nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk mengadopsi konsep **DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI)**, yaitu tren pemerintahan digital di dunia yang fokus ke 3 sistem dasar (**identitas digital, platform pertukaran data, dan pembayaran digital**) sebagai fondasi pemerintahan digital. Saat ini juga bahkan sudah ada piagam PBB khusus untuk DPI

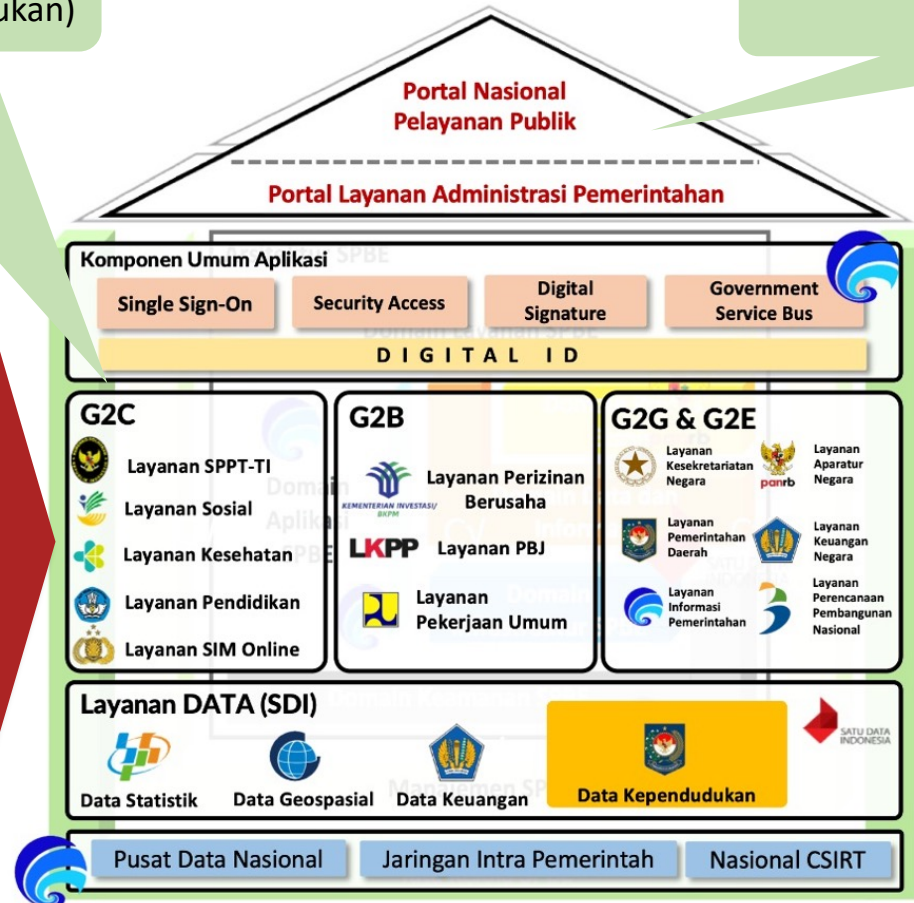


Berbasis data kependudukan (UU 24/2013 Administrasi Kependudukan)

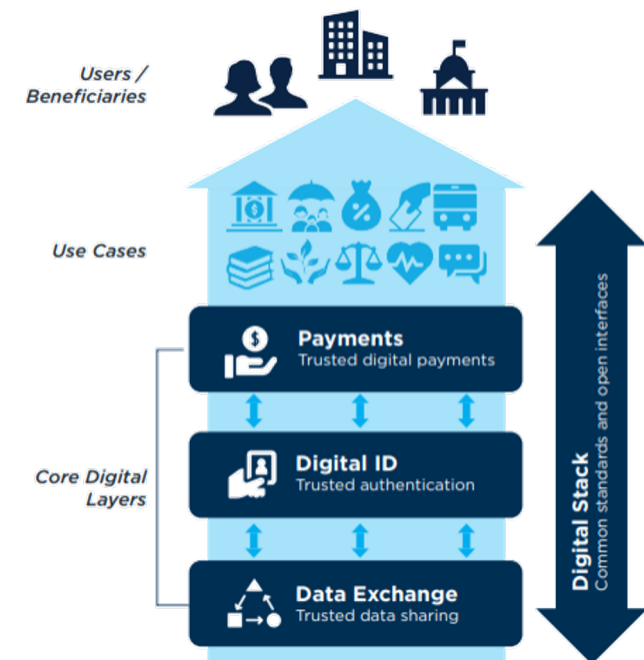
Portal Nasional Pelayanan Publik akan mendukung dalam program MPP-Digital



2024
Inisiatif Strategis



Digital Public Infrastructure (DPI)



Melalui arsitektur SPBE, tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, tetapi memastikan **interoperabilitas antar aplikasi existing** menjadi layanan digital pemerintah yang terpadu (**berupa platform digital nasional, dengan mengintegrasikan e-services berbagai instansi**)

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

PERAN DALAM PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE



Menteri PANRB

- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional (*Chief Information Officer – CIO Nasional*)
- Mengoordinasikan seluruh program SPBE Nasional (*Project Management Office – PMO Nasional*)
- Mengoordinasikan keselarasan Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah
- Pembina Domain Arsitektur Proses Bisnis
- Pembina Domain Layanan SPBE

Menteri PPN/ Bappenas

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional, sesuai Arsitektur SPBE Nasional
- Pembina Domain Arsitektur Data dan Informasi (Selaras dengan Kerangka Satu Data Indonesia)
- Chief Data Officer (CDO) Nasional

Menteri Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional, sesuai Arsitektur SPBE Nasional
- Chief Financial Officer (CFO) Nasional

Kepala BSSN

- Mengoordinasikan keamanan SPBE K/L/D
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE
- Pembina Domain Arsitektur Keamanan SPBE
- Chief Information Security Officer (CISO) Nasional



Menteri Kominfo

- Pembina Domain Arsitektur Aplikasi
- Pembina Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
- Chief Technology Officer (CTO) Nasional

Menteri Dalam Negeri

- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda, melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE
- Mendorong komitmen Kepala Daerah, untuk menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional
- Chief Regional Government Officer (CRGO)

Kepala BRIN

- Pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam pelaksanaan riset dan menciptakan inovasi layanan digital, seperti penggunaan kecerdasan artifisial
- Chief Research and Innovation Officer (CRIO) Nasional



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ORKESTRASI KEMENKO DALAM LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Keterpaduan Layanan Digital Nasional
ditopang oleh Arsitektur SPBE

Penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor

Interoperabilitas Aplikasi & Teknologi Informasi serta keamanan informasi

Platform digital layanan penanganan program nasional berbasis Arsitektur SPBE

Tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia, menuju interoperabilitas data dan informasi lintas sektor dalam penanganan program nasional (*Data-Driven Policy*)

Orkestrasi & harmonisasi penanganan program nasional antar Instansi Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor & dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital oleh

Kemenko

Program

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tata Kelola

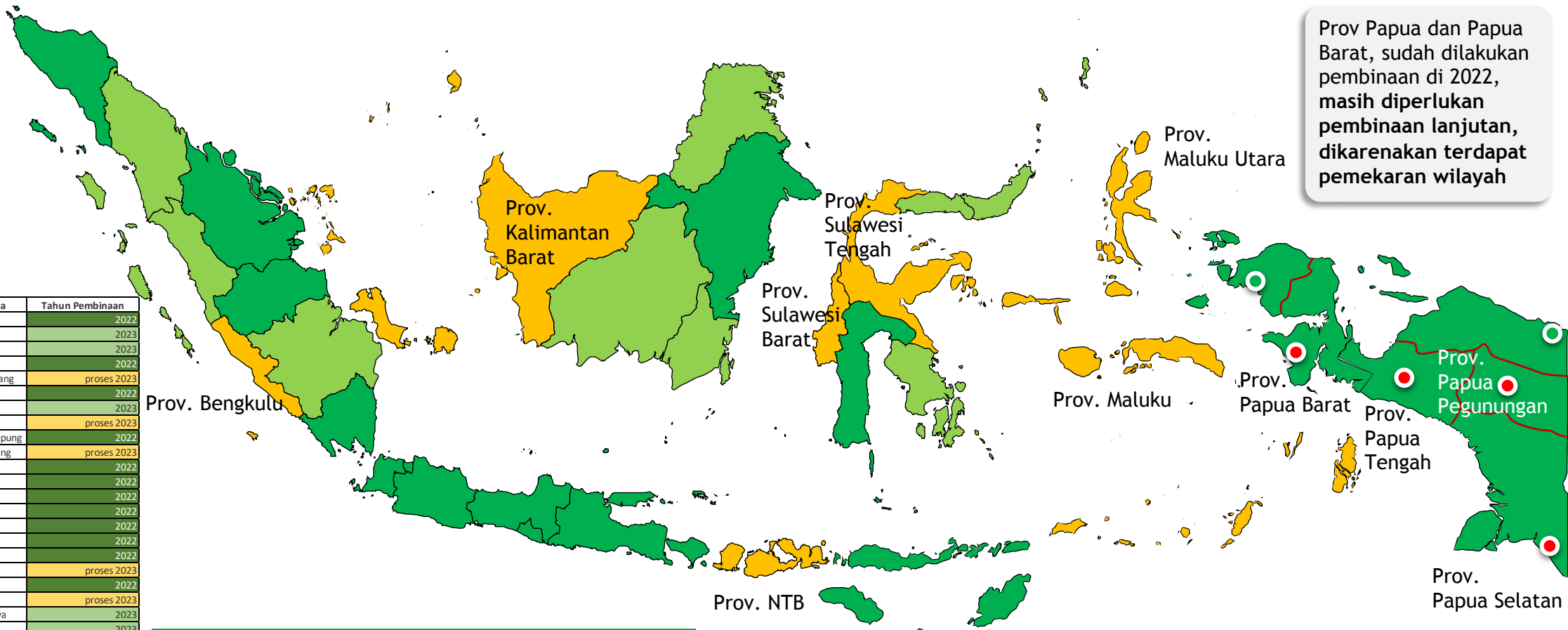


PEMBINAAN PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Hingga Minggu Ketiga Juni 2023



Prov Papua dan Papua Barat, sudah dilakukan pembinaan di 2022, masih diperlukan pembinaan lanjutan, dikarenakan terdapat pemekaran wilayah



No	Provinsi	Ibu Kota	Tahun Pembinaan
1	Nangroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	2022
2	Sumatera Utara	Medan	2023
3	Sumatera Barat	Padang	2023
4	Riau	Pekanbaru	2022
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	proses 2023
6	Jambi	Jambi	2022
7	Sumatera Selatan	Palembang	2023
8	Bengkulu	Bengkulu	proses 2023
9	Lampung	Bandar Lampung	2022
10	Bangka Belitung	Pangkalpinang	proses 2023
11	DKI Jakarta	Jakarta	2022
12	Jawa Barat	Bandung	2022
13	Banten	Serang	2022
14	Jawa Tengah	Semarang	2022
15	Yogyakarta (DIY)	Yogyakarta	2022
16	Jawa Timur	Surabaya	2022
17	Bali	Denpasar	2022
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Mataram	proses 2023
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Kupang	2022
20	Kalimantan Barat	Pontianak	proses 2023
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	2023
22	Kalimantan Selatan	Banjarmaru	2023
23	Kalimantan Timur	Samarinda	2022
24	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	2023
25	Sulawesi Utara	Manado	proses 2023
26	Gorontalo	Gorontalo	2023
27	Sulawesi Tengah	Palu	proses 2023
28	Sulawesi Selatan	Makassar	2022
29	Sulawesi Barat	Mamuju	proses 2023
30	Sulawesi Tenggara	Kendari	2023
31	Maluku	Kota Ambon	proses 2023
32	Maluku utara	Sofifi	proses 2023
33	Papua	Jayapura	2022
34	Papua Barat	Manokwari	Tambahan 2023
35	Papua Tengah	Nabire	Tambahan 2023
36	Papua Pegunungan	Jayawijaya	Tambahan 2023
37	Papua Selatan	Merauke	Tambahan 2023
38	Papua Barat Daya	Sorong	2022

Telah dilakukan Pembinaan 2022
16 Pem Prov dan 287 Pem Kab/Kota

Telah dilakukan Pembinaan 2023 (Hingga Juni)
24 Pem Prov dan 411 Pem Kab/Kota (akumulasi)

Belum dilaksanakan

Mekanisme pembinaan melalui bimtek pada Pem Prov beserta Pemkab/PemKot di lingkungannya, dilanjutkan diskusi daring via Whatsapp Group per-Provinsi. Sehingga mampu menyusun Arsitektur SPBE via aplikasi secara terpadu di lingkup Provinsi

Pelaksanaan bimtek, juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo (Balitbang) melalui program Government Transformation Academy (GTA), dimana telah Menyusun kurikulum mengenai Arsitektur SPBE

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah memiliki layanan pusat data dimaksud

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **pemanfaatan Layanan Pusat Data**, Sop penggunaan pusat data
- notulensi/laporan hasil pembangunan Layanan Pusat Data. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat Data

Level 2

IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data. serta didokumentasikan secara formal

Level 3


IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:




- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal





**Gambaran
Bukti Dukung
Level 3**



 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	NOMOR SOP	: 200/TL.02/2018
	TGL PEMBUATAN	: 31 Desember 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
	NAMA SOP	: SOP INSTALASI APLIKASI DI SERVER KEMENPAN OLEH TIM DATIN

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standard Operational Procedure (SOP) Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum TNDE di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kementerian PANRB Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Em Resmi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana harus mengetahui cara instalasi sistem operasi Linux Pelaksana mengetahui cara instalasi aplikasi berbasis PHP

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	Tim DATIN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Proses penempatan aplikasi dimulai						
2	Aplikasi harus menggunakan Linux terbaru						
3	Apakah Linux sudah menggunakan yang terbaru?	Ya					
4	Apakah aplikasi sudah dilakukan uji keamanan oleh lembaga yg berwenang						
5	Apakah aplikasi sudah dilakukan uji keamanan?	Ya					

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Unit Kerja	DATIN	Kelengkapan	Waktu	O
1	Ada permintaan penambahan Sub Domain					
2	Unit Kerja memilih nama Sub Domain					
3	Unit Kerja membuat Nota Dinas	Ya				
4	Apakah Sub Domain Tersedia?	TIDAK				
5	Tim DATIN melakukan konfigurasi Sub Domain di DNS Server					
6	Tim DATIN memberikan balasan Nota Dinas	Ya				
7	Sub Domain sudah bisa digunakan maksimal 1x24 jam				1x24 jam	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOTA DINAS

NOM

Yth : Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik
 Dari : Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana
 Hal : Permohonan Pembuatan VPS Server Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana
 Lampiran : -
 Tanggal : 11 September 2020

Sehubungan konfigurasi domain SPBE.GO.ID dengan alat bantu ISPCONFIG, dimohon untuk dapat memfasilitasi kegiatan konfigurasi tersebut dengan menyediakan sebuah VM(virtual machine) yang dapat diakses secara Internal beserta environment server tersebut. Adapun spesifikasi environment server adalah sebagai berikut:

- Spesifikasi VM:
- Core : 2
 - Memori : 4GB
 - Storage : 20GB
 - OS : Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-117-generic x86_64) - 64 bit

Adapun aplikasi ini diperuntukan untuk *production* domain SPBE.GO.ID bersama ini kami memohon untuk dapat menyediakan **IP publik** pada VM tersebut. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dimohon untuk dapat memberikan akses VM Server tersebut kepada kami atas nama

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang mendukung **interkoneksi/integrasi** dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau **Pusat Data Nasional**, serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumen **interkoneksi** dengan Pusat Data IPPD lain dan/atau Pusat Data Nasional
- **Notulensi hasil evaluasi** Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data

Contoh Surat Permohonan Layanan VPS (Virtual Private Server)

KOP SURAT

Nomor : Jakarta, 20.....
 Lampiran :
 Perihal : Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah/
 VPS (Virtual Private Server)

Kepada Yth,
 Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
 Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
 Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi dan pengelolaan VPS, bersama ini kami sampaikan informasi pengelola VPS.

Nama Pengelola :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 No. HP (Whatsapp/Telegram) :
 Email :

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jabatan Penanggung Jawab

Kontrak Penggunaan Layanan

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Dwi Anggono
 NIP : 19700516 199003 1 004
 Jabatan : Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta 10110.

Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia layanan dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pengguna layanan dari Dit LAIP, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Saya selaku PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Kontrak Penggunaan Layanan pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat yang berwenang,

Spesifikasi Teknis VPS (Virtual Private Server) K/L/D.....

A. Total Spesifikasi Kebutuhan

JUMLAH VM	vCPU	vRAM	Storage	Keterangan
..... vCPU GB GB	

B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhan

NAMA SERVER	KEBUTUHAN	SPEKIFIKASI
.....	vCPU : vCPU
		VRAM : GB
		Storage : GB
		IP Publik : (Ya/Tidak)
		Port Allowed :
		Jenis OS :
		Versi OS :
		Jenis Database :
		Versi Database :



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Daftar VM yang telah diakomodir di PDNS

href	Completion Time	name	object	bjectNam	Type	Task	progress
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:09	vdciUpdateVapp	https://igcp.layanan.go.id/	Menpan I vapp		Updated Virtual Application Menpan RB167ede39-e758-46b9-af8-2e1977de074d		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:04	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-7781321960a)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Hasura Cvm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:23	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Redis vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-ed7f-48da-9d60-540e8d68ee93)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:29	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Hasura Cvm		Updated Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:22	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Sentry vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Sentry(9879d4fe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:27	vdciRecomposeVapp	https://igcp.layanan.go.id/	Menpan I vapp		Recomposed Virtual Application Menpan RB167ede39-e758-46b9-af8-2e1977de074d	100	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:53	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Rabbitmq vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0d661db)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T13:42	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-7781321960a)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:29	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Redis vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-ed7f-48da-9d60-540e8d68ee93)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:30	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j Pr vm		Updated Virtual Machine Neo4j Prod(bbc0122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:34	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j Pr vm		Updated Virtual Machine RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0d661db)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:39	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Server M vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB167ede39-56ce-4a1a-ac12-70c5474cd60		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:32	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr vm		Updated Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-7781321960a)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:41	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Sentry vm		Updated Virtual Machine Sentry(9879d4fe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:37	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j Pr vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bbc0122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:14	vappDeploy	https://igcp.layanan.go.id/	Sentry vm		Running Virtual Machine Sentry(9879d4fe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:23	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j Pr vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bbc0122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:14	vappDeploy	https://igcp.layanan.go.id/	Redis vm		Running Virtual Machine Redis(7b6477b7-ed7f-48da-9d60-540e8d68ee93)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:10	vdciUpdateVappNetwork	https://igcp.layanan.go.id/	Menpan I vapp		Updated Virtual Application Menpan RB167ede39-e758-46b9-af8-2e1977de074d		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:22	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins vm		Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:39	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Redis vm		Updated Virtual Machine Redis(7b6477b7-ed7f-48da-9d60-540e8d68ee93)		
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:33	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Sonarqub vm		Updated Virtual Machine Sonarqub(11f66b1-3041-41af-a67b-b315e69c5b91)		

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat Data yang telah disusun.

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Level 5

Layanan Pusat data IPPD telah dilakukan **perbaikan atau peningkatan** sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

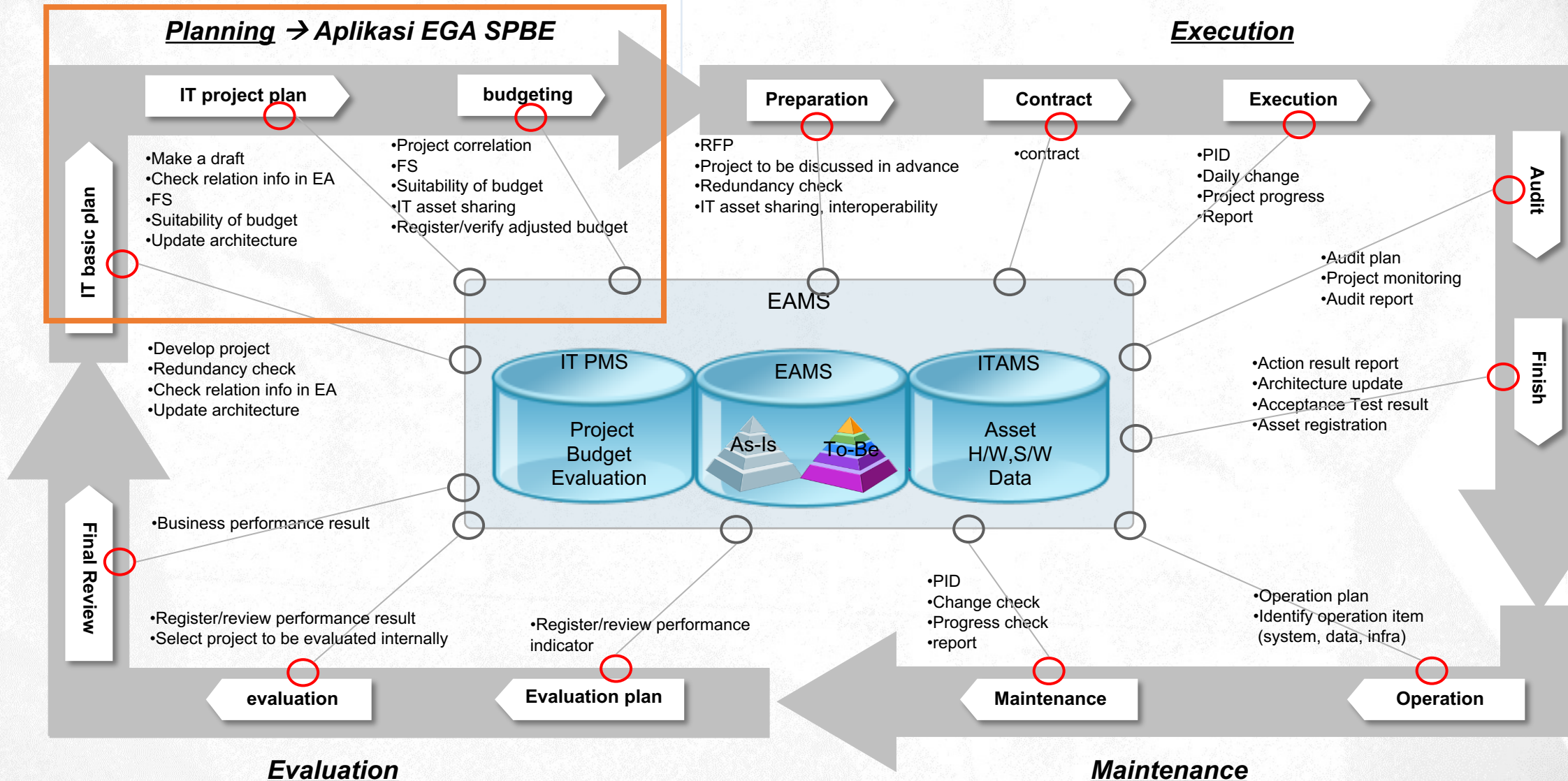
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan Pusat Data
- Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP, Dokumentasi Interkoneksi Layanan Pusat data yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan

href	Completion Time	name	object	bjectNam	Type	Task	progress
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:09:vdclUpdateVapp			https://igcp.layanan.go.i	Menpan	vapp	Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-af8b-2e1977de0704)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:04:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Matrix Pr	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:49:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Hasura Ci	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:49:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-7522f2937b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:23:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Redis	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e8e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:29:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Hasura Ci	vm	Updated Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:22:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Sentry	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Sentry(9879dafa-aa32-4a35-a04e-4a19edc6f30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:27:vdclRecomposeVapp			https://igcp.layanan.go.i	Menpan	vapp	Recomposed Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-af8b-2e1977de0704)	100
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:53:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Rabbitmq	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0661db)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T13:42:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Matrix Pr	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:29:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Redis	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e8e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:30:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Neo4j	Pr	Updated Virtual Machine Neo4j Prod(bb0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:34:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Rabbitmq	vm	Updated Virtual Machine RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0661db)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:39:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Server M	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB(60075636-56ce-4a14-ac12-70c5474c0d60)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:32:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Matrix Pr	vm	Updated Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:41:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Sentry	vm	Updated Virtual Machine Sentry(9879dafa-aa32-4a35-a04e-4a19edc6f30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:37:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Neo4j	Pr	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bb0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:49:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-7522f2937b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:14:vappDeploy			https://igcp.layanan.go.i	Sentry	vm	Running Virtual Machine Sentry(9879dafa-aa32-4a35-a04e-4a19edc6f30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:23:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Neo4j	Pr	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bb0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:10:vappDeploy			https://igcp.layanan.go.i	Redis	vm	Running Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e8e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:14:vappDeploy			https://igcp.layanan.go.i	Menpan	vapp	Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-af8b-2e1977de0704)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:22:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.i	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-7522f2937b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:33:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Redis	vm	Updated Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e8e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:33:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.i	Sonarqub	vm	Updated Virtual Machine Sonarqub(f16a6b1-3041-41af-a670-b315e9c5b91)	

Dokumen change request:
-penambahan
-perubahan
-penghapusan
VM/VPS, beserta dashboard monitoring-nya

Dokumen Baru

TATA KELOLA SPBE BERBASIS ARSITEKTUR SPBE



Pembelajaran dari Inggris & Estonia

Arah transformasi digital Indonesia sudah berada di arah yang tepat, sebagaimana juga yang dilakukan di Inggris dan Estonia serta beberapa negara di awal prosesnya. Namun, masih perlu akselerasi dan dukungan kerangka regulasi yang kuat.

FOKUS	INGGRIS	ESTONIA
<p>Inggris fokus ke kepuasan masyarakat, Estonia fokus ke kemudahan administrasi</p>	<p>KISAH SUKSES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi +2.000 website menjadi 1 portal • Platform Gov.UK diadopsi negara lainnya • Konsisten peringkat 10 teratas UN E-Gov Index 	<ul style="list-style-type: none"> • PDB per kapita meningkat 10x lipat (\$2800 to \$28.000) dalam 20 tahun terakhir, vs Indonesia yang 5x • 99% layanan publik sudah digital • Platform X-Road diadopsi di 20+ negara • Konsisten peringkat 10 teratas UN E-Gov Index
<p>Lembaga Terpusat untuk koordinasi strategi, kebijakan, dan implementasi</p>	<p>KELEMBAGAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Central Digital and Data Office (CDDO) di bawah Kantor Perdana Menteri untuk penyusunan strategi dan kebijakan; • Government Digital Services (GDS) di bawah Kantor Perdana Menteri untuk pengembangan dan implementasi sistem utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Government CIO Office Estonia, untuk penyusunan kebijakan dan strategi; • Otoritas Sistem Informasi (RIA), untuk pengembangan pengelolaan dan implementasi, termasuk bekerja sama dengan swasta dengan mekanisme KPBU (jika dibutuhkan)
<p>1 portal untuk seluruh layanan publik, berbasis identitas digital</p>	<p>LAYANAN DIGITAL UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gov.UK (portal layanan publik terintegrasi) • Konsolidasi +7700 layanan dalam 1 portal, one login melalui Digital Identity 	<ul style="list-style-type: none"> • Eesti.ee (portal layanan publik terintegrasi), • Konsolidasi 500+ layanan dalam 1 portal, one login melalui Digital Identity
<p>Fokus ke DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE</p>	<p>SISTEM UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gov.UK One Login (identitas digital); • Gov.UK Pay (pembayaran digital); • Gov.UK Notify; • Gov.UK Forms 	<ul style="list-style-type: none"> • e-ID/Digital ID/Mobile ID (identitas digital); • X-Road (platform pertukaran data) • Digital Healthcare (platform layanan kesehatan) • Digital Business (platform layanan dunia usaha)
<ul style="list-style-type: none"> - Political Will - Rekrutmen talenta - Fokus ke DPI - Literasi Digital - Fokus Pengguna - Keamanan Informasi 	<p>FAKTOR SUKSES KUNCI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemauan politik/kepemimpinan untuk mensentralisasi koordinasi secara konkret; • Rekrutmen talenta digital swasta ke dalam lingkungan pemerintahan untuk membangun kemampuan eksekusi/implementasi; • Fokus kepada kebutuhan pengguna (<i>Citizen Centric</i>) • Keamanan informasi dan jaminan keberlangsungan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi Digital dengan kepemimpinan digital yang kuat di seluruh lini pemerintahan • Fokus ke sistem-sistem utama (identitas digital, platform pertukaran data, pembayaran digital, layanan dasar, dan layanan dunia usaha); • Literasi/pemahaman digital baik masyarakat dan terutama internal ASN di berbagai level • Digital Trust dan Cyber Security

Portal Layanan Publik Inggris & Estonia

Website menampilkan langsung kebutuhan rakyat, tidak berdasarkan perspektif instansi (*Citizen Centric*).
 Di Inggris contoh langsung ada link: **Bagaimana mendapatkan bansos, bagaimana melihat riwayat asuransi pemerintah, bagaimana mendapatkan kerja, dll.** Di Estonia ada link : **bagaimana saat saya sakit, bagaimana saat akan mempunyai anak, bagaimana saat akan menikah, bagaimana mengganti data alamat, dll.**





panrb

Industri Perbankan dan Jasa Keuangan

Kartu Identitas Elektronik di Estonia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KTP Estonia hanya menampilkan sedikit data di fisik, tapi secara elektronik dapat digunakan langsung dengan tap KTP ke Laptop atau perangkat elektronik lain untuk mengakses berbagai layanan publik digital, bahkan untuk layanan transportasi publik dan belanja. Di Indonesia kebanyakan masih digunakan secara manual, belum tap secara otomatis.



ESTONIA



KTP Depan

Tertera

- Data tertera:
1. NIK
 2. Nama lengkap
 3. Warga Negara
 4. Jenis kelamin
 5. Tanggal lahir
 6. Masa berlaku

Data dalam chip:

- Data detail lainnya
- Cryptographic Key
- Public Key Certificates

(Intensif digunakan dalam berbagai layanan pemerintah dan juga transaksi keuangan)

Chip



KTP Belakang



Card Reader ada di kebanyakan Laptop untuk membaca kartu (Digunakan standar di perangkat elektronik sebagai kemudahan dan keamanan akses digital)



INDONESIA



Tertera

- Data tertera:
1. NIK
 2. Nama Lengkap
 3. Tempat/Tanggal Lahir
 4. Jenis Kelamin
 5. Golongan Darah
 6. Alamat
 7. Agama
 8. Status Perkawinan
 9. Pekerjaan
 10. Warga Negara
 11. Masa berlaku

KTP Depan



KTP Belakang

Data NIK melalui sistem elektronik menjadi layanan terpusat di Kemendagri, untuk fungsi verifikasi dan validasi identitas, pada berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah

Kegunaan kartu secara elektronik



Autentikasi untuk login ke seluruh layanan publik dan administrasi pemerintah



Digital signature untuk dokumen resmi, terintegrasi dengan Nasional Smart ID (Digital ID dan Mobile ID)



Fungsi lain

- Voting
- Layanan Kesehatan
- Belanja
- Transportasi publik
- dan banyak lainnya

Kegunaan kartu secara elektronik



Akses layanan beberapa bank dan BPJS



Secara umum masih jarang digunakan secara elektronik (lebih sering digunakan secara manual, dengan cara menuliskan/foto data yg tertera)

Indonesia Saat Ini dan *Best Practice*

Diperlukan **terobosan** agar Indonesia dapat mewujudkan potensi **Pemerintah Digital** secara **maksimal**

FOKUS

Koordinasi Strategi dan Kebijakan telah dilaksanakan Tim Koordinasi SPBE dan Kemenko, namun **masih diperlukan adanya pengelola terpusat untuk implementasi teknis**

Perlu ditentukan bahwa **hanya ada 1 portal untuk seluruh layanan publik**, berbasiskan identitas digital

Indonesia perlu **fokus ke DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI) sebagai dasar** dimana layanan lain akan dibangun

- **Political Will**
- **Kepemimpinan digital**
- **Rekrutmen talenta**
- **Prioritas ke DPI**
- **Sentralisasi lembaga**
- **Fokus Pengguna**

KELEMBAGAAN



- Strategi dan Kebijakan oleh **Tim Koordinasi SPBE Nasional (7 Instansi) Kementerian Koordinator**
- **Tidak ada institusi/lembaga khusus** untuk pengembangan dan implementasi layanan digital nasional (pembangunan sektoral)



LAYANAN DIGITAL UTAMA



- **Terpisah dan tidak terintegrasi** (bersifat sektoral dan *government centric*)
- **Direncanakan** akan ada Portal Pelayanan Publik Nasional dan Super-App dengan beberapa layanan sebagai pilot, **berbasis Arsitektur SPBE Nasional**

SISTEM UTAMA



- Database NIK masih **terbatas pada fungsi verifikasi dan validasi identitas**
- Sebatas portal data terpadu, **belum ada kapabilitas sebagai platform pertukaran data nasional**
- Sudah ada sistem Kemenkeu (MPN) dan BI (QRIS, BI-FAST), serta rencana pengembangan sistem transaksi keuangan negara kepada masyarakat (*Government to Person/G2P*), **namun belum terkonsolidasi**

FAKTOR SUKSES KUNCI



- **Kemauan dan dukungan politik**
- **Kepemimpinan digital**
- Fokus ke pengguna (**Citizen Centric**)
- Penguatan/**sentralisasi tata kelola** dan kelembagaan
- Rekrutmen **talenta digital terbaik** ke pemerintahan
- Prioritisasi **Digital Public Infrastructure** dan **interoperabilitas sistem** eksisting

INDONESIA

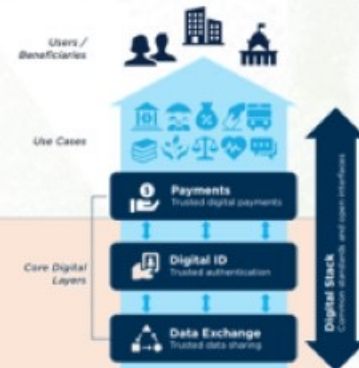


BEST PRACTICE

- **Lembaga khusus dan sentral** untuk memimpin strategi dan kebijakan
- **Lembaga khusus dan sentral** untuk eksekusi pengembangan dan implementasi

GovTech

- **Layanan terpadu secara nasional** (lintas sektor dan citizen centric)
- **1 Portal dan/atau app utama pemerintah** dengan **layanan publik terintegrasi, berbasis identitas digital nasional** sehingga membutuhkan **hanya satu akun (single sign-on)** untuk seluruh layanan
- **3 sistem utama dikelola pemerintah sebagai dasar pemerintahan digital (Digital Public Infrastructure Framework)**
 1. Identitas digital nasional
 2. Platform pertukaran data
 3. Pembayaran digital



Inisiatif Perpres Percepatan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Perpres Percepatan Transformasi Digital dirancang dengan membawa semangat Perpres SPBE dan Satu Data, mempedomani Arsitektur SPBE Nasional, untuk **membawa dampak aktual peningkatan kepuasan masyarakat, daya saing ekonomi digital, dan capaian indeks global pemerintahan digital.**



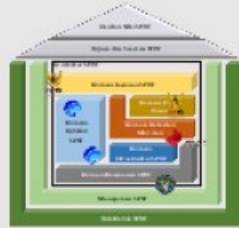
Perpres SPBE:
Prinsip keterpaduan melalui pelaksanaan Arsitektur SPBE

Perpres Satu Data Indonesia:
Manajemen data SPBE dan Domain Data dan Informasi Arsitektur SPBE



SATU DATA INDONESIA

Arsitektur SPBE Nasional



- 1 Arsitektur SPBE Nasional
- 2 Target Inisiatif Strategis 2024

- Peran Kementerian Koordinator
- Peran Tim Koordinasi SPBE Nasional

Rancangan Perpres



"Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional"

- Penugasan Perum Peruri sebagai GovTech Indonesia
- Klausula Pengakhiran/Terminasi Aplikasi untuk Efektifitas dan Efisiensi
- Fokus 9 aplikasi prioritas TW 3 2024
- Penganggaran dan pendanaan



Peningkatan **kepuasan masyarakat** dan **daya saing ekonomi digital**

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN INDONESIA



Peningkatan **capaian indeks global pemerintahan digital**

Isu-Isu Strategis SPBE di Rancangan Perpres

Perpres dirancang agar mampu menjawab isu-isu strategis SPBE yang selama ini menghambat implementasi dan akselerasi *progress*



Kapabilitas Implementasi Layanan Digital

Saat ini pengembangan sistem dan layanan digital **dikerjakan oleh vendor dengan kemampuan yang tidak terstandar**

Penugasan PERUM PERURI sebagai *National digital solution provider*, pengembang, dan penyelenggara Aplikasi SPBE Prioritas



Koordinasi Penerapan SPBE Antar Lembaga

Saat ini mekanisme **koordinasi K/L/D masih terfragmentasi** dan pemahaman atas implementasi SPBE **belum seragam dan sejalan**

Penguatan Peran Kemenko dan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam koordinasi kebijakan dan pencapaian target



Kepastian Hukum Efisiensi Aplikasi Digital

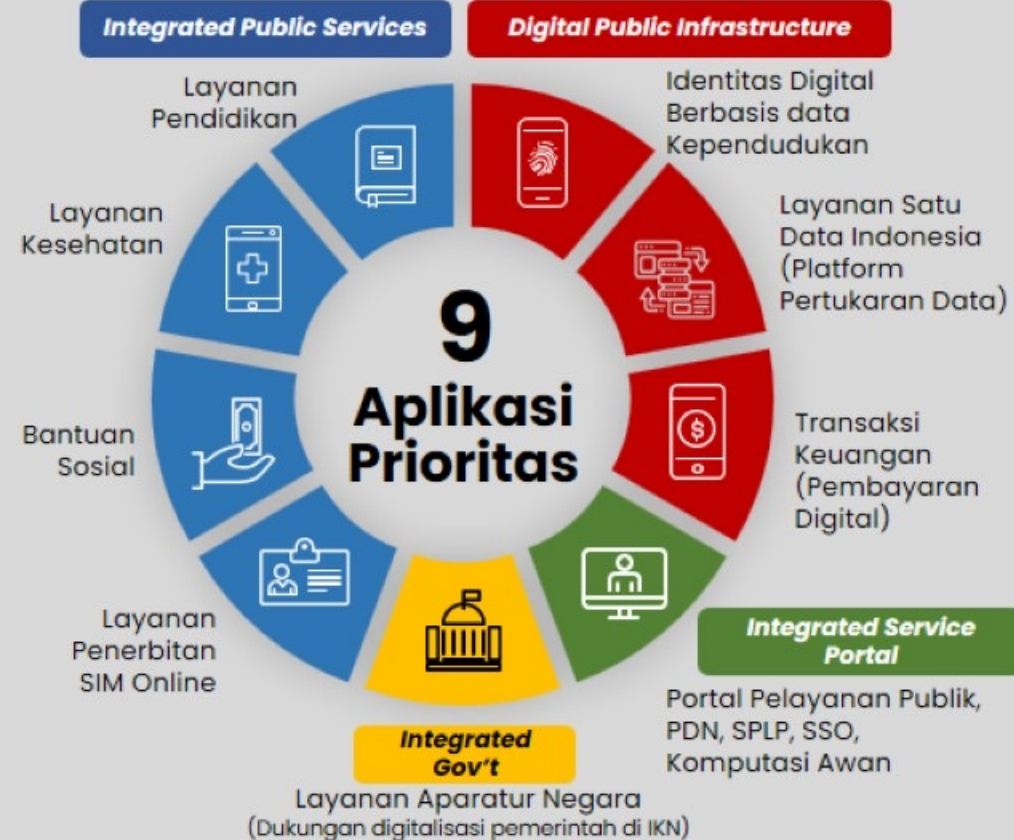
Saat ini **efisiensi dan efektivitas** integrasi 27 ribu aplikasi pemerintah **sulit dilakukan, belum ada perlindungan** untuk terminasi aplikasi

Pemberian **kewenangan** untuk melakukan **terminasi aplikasi tanpa dianggap kerugian negara**



Fokus Aplikasi SPBE Prioritas

diluncurkan di TW 3 2024



Kriteria lainnya:

- Aplikasi dengan anggaran lebih dari 10 Milyar Rupiah/tahun
- Aplikasi memiliki lebih dari 200.000 pengguna

TANTANGAN

SOLUSI

Dukungan Penganggaran dan Pendanaan



panrb

Badan Penyelenggara
Pelayanan Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Roadmap Pencapaian Layanan Digital Nasional

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dengan waktu yang terbatas, maka dibutuhkan penguatan kebijakan melalui penetapan perpres, agar dapat segera memulai berbagai langkah untuk implementasi Perpres, menuju ke **peluncuran aplikasi prioritas di TW3 2024**, dari **tata kelola dan regulasi**, hingga **transformasi Perum Peruri** untuk **memiliki kapabilitas bisnis digital**, sehingga dapat mendukung penugasan



Keterangan



Tata Kelola & Regulasi



Aplikasi & Sistem Prioritas



Manajemen perubahan, Strategi & Komunikasi



Penguatan Kapabilitas Perum Peruri



panrb

Ministerium Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dukungan Percepatan Transformasi Digital

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan

- ✓ Mengoordinasikan percepatan integrasi Layanan digital nasional dan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Politik, Hukum, dan Keamanan,
- ✓ **koordinasi pelaksanaan percepatan transformasi digital**

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan

- ✓ Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Koordinator Bidang Perekonomian

- ✓ Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Perekonomian

Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi

- ✓ Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif strategis SPBE pada lingkup Kemaritiman & Investasi

Pimpinan K/L dan Pemda

- ✓ Melakukan seluruh inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan

Menteri PANRB

- ✓ Melakukan **koordinasi & sinkronisasi** pelaksanaan penerapan SPBE
- ✓ Mendukung adanya optimalisasi unit yang melaksanakan fungsi transformasi strategis

Menteri Keuangan

- ✓ Memberikan dukungan anggaran dan mekanisme pendanaan untuk percepatan penerapan inisiatif strategis SPBE
- ✓ Melakukan **transformasi penganggaran dan pendanaan** untuk mendukung penugasan Perum Peruri dalam penyelenggaraan Aplikasi SPBE

Menteri Dalam Negeri

- ✓ Mempercepat pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung **penerapan Digital ID**
- ✓ Memperkuat penerapan SPBE di pemerintah daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika

- ✓ Melakukan **pembinaan pengelolaan TIK** berupa:
 - interoperabilitas aplikasi, data dan informasi;
 - interoperabilitas antar infrastruktur pendukung Aplikasi SPBE; dan
 - penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik

Menteri PPN/Kepala Bappenas

- ✓ Melakukan **pembinaan layanan Satu Data** Indonesia (SDI) sebagai pertukaran data nasional

Menteri BUMN

- ✓ Memastikan konsolidasi dan sinkronisasi penerapan SPBE terpadu melalui Sinergi BUMN Memastikan dan
- ✓ memfasilitasi **transformasi Perum Peruri** dengan kapabilitas bisnis digital

Kepala BSSN

- ✓ Memastikan **keamanan informasi** pada layanan digital pemerintah

Kepala BPKP

- ✓ Melaksanakan **pengawasan dan akuntabilitas** penyelenggaraan aplikasi SPBE

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek

- ✓ Memastikan pelaksanaan **layanan digital pendidikan secara terpadu**
- ✓ Penguatan talenta digital pada Perum Peruri

Menteri Kesehatan

- ✓ Memastikan pelaksanaan **layanan digital kesehatan secara terpadu**
- ✓ Penguatan talenta digital pada Perum Peruri

Menteri Sosial

- ✓ Memastikan pelaksanaan **layanan digital sosial secara terpadu**

Kepala POLRI

- ✓ Memastikan pelaksanaan **layanan SIM Online secara terpadu**



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**# bangga
melayani
bangsa**





TERIMA KASIH

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB